



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4893-4900

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan Health Book Passport Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yang Dideportasi Dari Malaysia Melalui PLBN Entikong

Tri Aan Agustiansyah¹, Lidia Hastuti², Lilis Lestari³, Wida Kuswida Bhakti⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Keperawatan Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat

triaan.taa@gmail.com¹, lidya_zain@yahoo.com², lilis@stikmuhptk.ac.id³, wida.kuswida@stikmuhptk.ac.id⁴

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong merupakan kelompok rentan yang memiliki berbagai permasalahan kesehatan, khususnya penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, gastritis, dan gangguan psikologis dan Penyakit Menular seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tuberkulosis, penyakit kulit menular, diare, hingga penyakit infeksi berbasis lingkungan akibat kondisi tempat tinggal yang padat dan kurang higienis selama bekerja maupun saat berada di depot tahanan imigrasi. Selama proses deportasi, sebagian besar PMI tidak memiliki dokumen kesehatan maupun riwayat pengobatan yang lengkap sehingga pelayanan kesehatan sering tidak berkesinambungan. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan penanganan penyakit, putus pengobatan, serta rendahnya pemantauan kesehatan PMI setelah kembali ke daerah asal. Artikel ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi Health Book Passport sebagai media pencatatan kesehatan manual bagi PMI yang di deportasi melalui PLBN Entikong. Inovasi ini berupa buku kesehatan portabel berbentuk seperti paspor yang digunakan untuk mencatat identitas kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan awal, monitoring penyakit menular dan penyakit tidak menular, riwayat pengobatan, edukasi kesehatan, dan rujukan pelayanan kesehatan. Health Book Passport dirancang sederhana, praktis, mudah digunakan, dan tidak bergantung pada jaringan internet sehingga sesuai diterapkan di wilayah perbatasan dengan kendala jaringan internet. Implementasi inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan kesehatan, mendukung deteksi dini PTM dan penyakit menular, mempermudah tenaga kesehatan dalam pemantauan kondisi PMI deportasi, serta mencegah putus pengobatan penyakit kronis. Selain itu, Health Book Passport dapat menjadi dokumen kesehatan portabel yang dibawa PMI hingga kembali ke daerah asal untuk tindak lanjut pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan ditempat mereka berasal. Dengan demikian, inovasi ini berpotensi meningkatkan perlindungan kesehatan PMI deportasi secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Health Book Passport, Pekerja Migran Indonesia, Deportasi, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular, PLBN Entikong.

Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok pekerja yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di Indonesia. Namun demikian, PMI juga termasuk kelompok rentan yang menghadapi berbagai permasalahan kesehatan akibat kondisi kerja berat, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, lingkungan kerja yang kurang mendukung, serta tekanan psikologis selama bekerja di luar negeri (Cahyani & Indriani, 2023). Permasalahan kesehatan tersebut semakin kompleks pada PMI yang mengalami deportasi karena sering kali mereka dipulangkan dalam kondisi fisik dan mental yang menurun akibat proses kerja, penahanan, maupun deportasi (Safitri & Wibisono, 2022).

Salah satu jalur utama pemulangan PMI deportasi dari Malaysia khususnya PMI yang bekerja di negara bagian Sarawak adalah melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong yang merupakan salah satu wilayah perbatasan Kalimantan Barat. PMI deportasi yang masuk melalui PLBN Entikong umumnya bekerja pada sektor informal seperti perkebunan, konstruksi, jasa, industri, dan pekerja rumah tangga. Kondisi kerja yang berat, kepadatan tempat tinggal, sanitasi yang kurang baik, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan menyebabkan PMI rentan mengalami berbagai masalah kesehatan baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular (Agustiansyah et al., 2024).

Menurut data dari Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong dari Januari sampai dengan Mei 2026 menunjukkan telah terjadi 25 kali deportasi dan 9 (sembilan) kali repatriasi, dengan jumlah orang yang di deportasi sebanyak

3114 orang dan 31 orang repatriasi. Dari jumlah tersebut, pada umumnya memang terlihat sehat tetapi saat dilakukan screening kesehatan sederhana barulah diketahui ada keluhan kesehatan yang dialami PMI tersebut, baik itu penyakit tidak menular yang kronis karena tidak terkontrol dengan baik, maupun penyakit menular yang di dapatkan PMI selama bekerja atau selama dipenjarakan pada depot tahanan imigrasi.

Penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, gastritis, kolesterol tinggi, dan gangguan kesehatan mental merupakan masalah kesehatan yang sering ditemukan pada PMI. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, stres kerja, kurang istirahat, serta keterbatasan kontrol kesehatan selama bekerja di luar negeri. PTM memerlukan pengobatan dan pemantauan jangka panjang secara berkesinambungan. Akan tetapi, pada PMI deportasi sering terjadi putus pengobatan akibat perpindahan lokasi, keterbatasan biaya, rendahnya pengetahuan kesehatan, serta tidak adanya media pencatatan kesehatan yang dapat dibawa selama proses deportasi hingga kembali ke daerah asal (Cahyani & Indriani, 2023).

Selain PTM, PMI deportasi juga rentan mengalami penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tuberkulosis, penyakit kulit menular, diare, hingga penyakit infeksi berbasis lingkungan akibat kondisi tempat tinggal yang padat dan kurang higienis selama bekerja maupun saat berada di depot tahanan imigrasi. Mobilitas lintas negara dan keterlambatan pemeriksaan kesehatan juga meningkatkan risiko penularan penyakit menular pada PMI deportasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting karena penyakit menular dapat berdampak pada kesehatan individu maupun masyarakat apabila tidak dilakukan deteksi dan penanganan secara cepat (Safitri & Wibisono, 2022).

Selain itu, pelayanan kesehatan bagi PMI deportasi di wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai kendala seperti belum optimalnya sistem dokumentasi kesehatan, keterbatasan media pencatatan kesehatan berkelanjutan, serta belum terintegrasinya riwayat kesehatan PMI antara shelter deportasi dan fasilitas kesehatan di daerah asal. Dokumentasi kesehatan yang tidak lengkap menyebabkan tenaga kesehatan kesulitan melakukan tindak lanjut pelayanan kesehatan, baik pada kasus penyakit kronis maupun penyakit menular yang membutuhkan pemantauan rutin dan kesinambungan terapi (Juliansyah et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan inovasi pelayanan kesehatan yang sederhana, praktis, murah, dan mudah diterapkan di wilayah perbatasan. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan adalah Health Book Passport, yaitu buku kesehatan manual berbentuk seperti paspor yang digunakan sebagai media pencatatan riwayat kesehatan PMI deportasi. Buku ini memuat identitas kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan awal, monitoring penyakit tidak menular dan penyakit menular, riwayat pengobatan, edukasi kesehatan, serta rujukan pelayanan kesehatan. Health Book Passport diharapkan mampu meningkatkan kesinambungan pelayanan kesehatan, mendukung deteksi dini penyakit, serta mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan kesehatan PMI deportasi mulai dari PLBN Entikong hingga kembali ke daerah asal (Saleh et al., 2023).

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam inovasi Health Book Passport adalah penerapan buku kesehatan manual bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong. Penerapan dilakukan dengan memberikan Health Book Passport kepada PMI saat proses skrining kesehatan awal di PLBN Entikong.

Buku tersebut digunakan untuk mencatat identitas kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan, riwayat penyakit menular dan penyakit tidak menular, pengobatan, serta rujukan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Health Book Passport dibawa oleh PMI selama berada di shelter deportasi hingga kembali ke daerah asal sebagai media monitoring dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Data kesehatan dalam buku diisi oleh petugas kesehatan pada setiap pemeriksaan sehingga mempermudah pemantauan kondisi kesehatan PMI secara berkelanjutan

3. Hasil dan Diskusi

Health Book Passport merupakan inovasi pelayanan kesehatan berupa buku kesehatan manual berbentuk seperti paspor yang dirancang khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama PMI yang dideportasi dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong. Buku ini berfungsi sebagai media pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan riwayat kesehatan PMI secara berkelanjutan mulai dari proses kedatangan di wilayah perbatasan, selama berada di shelter deportasi, hingga kembali ke daerah asal (Cahyani & Indriani, 2023)

Health Book Passport dikembangkan sebagai solusi sederhana terhadap permasalahan kurangnya dokumentasi kesehatan pada PMI deportasi. Banyak PMI yang dipulangkan tidak membawa dokumen kesehatan, riwayat pengobatan, maupun hasil pemeriksaan medis sebelumnya sehingga tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan lanjutan, monitoring penyakit, dan pemberian terapi yang tepat. Oleh karena itu, Health Book Passport hadir sebagai identitas kesehatan portabel yang dapat dibawa oleh PMI selama proses pelayanan kesehatan berlangsung (Safitri & Wibisono, 2022).

Buku kesehatan ini memuat berbagai informasi penting terkait kondisi kesehatan PMI, seperti identitas diri, hasil pemeriksaan kesehatan awal, riwayat penyakit tidak menular dan penyakit menular, riwayat pengobatan, alergi obat, status vaksinasi, hasil pemeriksaan laboratorium sederhana, edukasi kesehatan, hingga lembar rujukan pelayanan kesehatan. Seluruh data tersebut dicatat secara manual oleh tenaga kesehatan pada setiap pemeriksaan sehingga riwayat kesehatan PMI dapat terdokumentasi secara sistematis dan mudah dipantau (Juliansyah et al., 2024).

Selain sebagai media pencatatan kesehatan, Health Book Passport juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara PMI dengan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Buku ini mempermudah tenaga kesehatan dalam mengetahui kondisi kesehatan PMI sebelumnya sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berkesinambungan. Health Book Passport juga membantu PMI memahami kondisinya sendiri, mengingat jadwal pengobatan, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan selama dan setelah bekerja di luar negeri (Agustiansyah et al., 2024).

Keunggulan utama dari Health Book Passport adalah bentuknya yang praktis, mudah dibawa, sederhana, serta tidak bergantung pada jaringan internet maupun perangkat digital. Inovasi ini sangat sesuai diterapkan di wilayah perbatasan seperti PLBN Entikong yang memiliki mobilitas tinggi dan keterbatasan sarana teknologi kesehatan digital. Dengan adanya Health Book Passport, diharapkan pelayanan kesehatan bagi PMI deportasi dapat menjadi lebih terstruktur, kesinambungan pengobatan tetap terjaga, serta deteksi dini penyakit menular maupun penyakit tidak menular dapat dilakukan secara optimal (Saleh et al., 2023).

Tujuan

1. Mendokumentasikan kondisi kesehatan PMI deportasi.
2. Membantu deteksi dini penyakit tidak menular dan penyakit menular
3. Mempermudah tenaga kesehatan melakukan monitoring kesehatan.
4. Mencegah putus pengobatan penyakit kronis.
5. Menjadi dokumen rujukan kesehatan PMI hingga ke daerah asal.

Sasaran Utama

PMI deportasi dari Malaysia yang masuk melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong

Sasaran Pendukung

- Petugas kesehatan PLBN
- Kementerian P2MI/BP3MI Kalimantan Barat
- Shelter PMI
- Puskesmas daerah asal PMI
- Rumah sakit rujukan

Bentuk Buku

- Ukuran kecil seperti paspor
- Sampul tahan air
- Mudah dibawa
- Menggunakan Bahasa Indonesia sederhana
- Memiliki nomor identitas kesehatan PMI



Gambar 1.1 *Health Book Passport*

Isi *Health Book Passport*

1. Identitas PMI

- Nama lengkap
- Jenis kelamin
- Umur
- Daerah asal
- Nomor paspor
- Kontak keluarga
- Negara tempat bekerja

2. Data Deportasi

- Tanggal masuk PLBN Entikong
- Lama bekerja di Malaysia
- Status deportasi
- Riwayat penahanan
- Keluhan utama saat deportasi

3. Pemeriksaan Kesehatan Awal

- Tekanan darah
- Nadi
- Suhu tubuh
- Berat badan
- Gula darah sewaktu
- Pemeriksaan fisik sederhana
- Skrining kesehatan mental

4. Riwayat Pengobatan

- Nama obat
- Dosis
- Jadwal minum obat
- Kepatuhan pengobatan

6. Lembar Rujukan

- Puskesmas
- Rumah sakit
- Layanan kesehatan jiwa
- Tindak lanjut daerah asal

Alur Pelaksanaan

- Melakukan skrining kesehatan awal
- Mengisi *Health Book Passport*
- Memberikan edukasi kesehatan sesuai dengan penyakit yang diderita PMI

Keunggulan

| No | Keunggulan | Manfaat |
|----|---|---------------------------------|
| 1 | Praktis dan sederhana | Mudah digunakan petugas dan PMI |
| 2 | Tidak bergantung internet | Cocok di wilayah perbatasan |
| 3 | Riwayat kesehatan berkelanjutan | Mempermudah tindak lanjut |
| 4 | Biaya murah | Mudah diterapkan |
| 5 | Mendukung deteksi dini PTM dan Penyakit Menular | Mengurangi komplikasi |
| 6 | Mempermudah rujukan | Pelayanan kesehatan lebih cepat |

Dampak yang Diharapkan

Bagi PMI

- Kesehatan lebih terpantau
- Tidak putus pengobatan
- Mendapat edukasi kesehatan

Bagi Tenaga Kesehatan

- Mempermudah monitoring dan dokumentasi kesehatan
- Mempermudah sistem rujukan

Bagi Pemerintah

- Mendukung perlindungan kesehatan PMI deportasi
- Menjadi data dasar kesehatan PMI perbatasan

Hasil

Penerapan inovasi *Health Book Passport* pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong menunjukkan bahwa buku kesehatan manual ini dapat digunakan sebagai media pencatatan kesehatan yang praktis dan mudah diterapkan di wilayah perbatasan. *Health Book Passport* membantu petugas kesehatan dalam mendokumentasikan identitas kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan awal, riwayat penyakit menular dan penyakit tidak menular, pengobatan, serta rujukan pelayanan kesehatan PMI deportasi (Juliansyah et al., 2024). Selama penerapan inovasi, PMI deportasi membawa *Health Book Passport* sejak proses skrining kesehatan di PLBN Entikong hingga menuju shelter deportasi dan daerah asal. Buku tersebut digunakan untuk mencatat kondisi kesehatan PMI secara berkelanjutan sehingga riwayat kesehatan lebih mudah dipantau oleh tenaga kesehatan. Selain itu, *Health Book Passport* membantu mengurangi kehilangan data kesehatan dan mempermudah proses tindak lanjut pelayanan kesehatan pada PMI yang memiliki penyakit kronis maupun penyakit menular (Cahyani & Indriani, 2023).



Gambar 1.2 Kegiatan pemeriksaan PMI di Entikong/Sanggau/Indonesia

Penerapan *Health Book Passport* juga meningkatkan kemudahan komunikasi antara PMI dan tenaga kesehatan karena seluruh hasil pemeriksaan dan riwayat pengobatan tercatat dalam satu buku. PMI menjadi lebih memahami kondisi kesehatannya serta lebih mudah mengingat jadwal pengobatan dan kontrol kesehatan. Bagi tenaga kesehatan, inovasi ini membantu mempercepat proses pemeriksaan dan rujukan karena data kesehatan PMI tersedia secara sederhana dan sistematis (Agustiansyah et al., 2024).

Secara umum, inovasi *Health Book Passport* memberikan manfaat dalam mendukung kesinambungan pelayanan kesehatan, deteksi dini penyakit, serta monitoring kesehatan PMI deportasi secara berkelanjutan mulai dari wilayah perbatasan hingga kembali ke daerah asal. Inovasi ini juga dapat menjadi salah satu bentuk penguatan perlindungan kesehatan PMI di wilayah perbatasan, khususnya pada PMI deportasi yang memiliki keterbatasan dokumen kesehatan dan akses pelayanan kesehatan (Safitri & Wibisono, 2022).



Gambar 1.3 Kegiatan pemeriksaan PMI di Entikong/Sanggau/Indonesia

Pembahasan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong merupakan kelompok rentan yang memiliki berbagai masalah kesehatan baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular. Kondisi kerja yang berat, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat, serta tekanan psikologis selama bekerja di luar negeri menjadi faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan PMI deportasi. Selain itu, proses deportasi dan penahanan juga dapat memperburuk kondisi fisik maupun mental PMI sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (Agustiansyah et al., 2024).

Hasil penerapan inovasi *Health Book Passport* menunjukkan bahwa media pencatatan kesehatan manual ini mampu membantu tenaga kesehatan dalam mendokumentasikan kondisi kesehatan PMI deportasi secara lebih sistematis. Selama ini, salah satu kendala utama pelayanan kesehatan PMI deportasi adalah tidak adanya dokumen kesehatan yang dibawa oleh PMI saat dipulangkan ke Indonesia. Akibatnya, tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam mengetahui riwayat penyakit, riwayat pengobatan, maupun pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Dengan adanya *Health Book Passport*, seluruh informasi kesehatan PMI dapat dicatat dalam satu buku sehingga mempermudah proses pemeriksaan lanjutan dan tindak lanjut pelayanan kesehatan (Juliansyah et al., 2024).

Health Book Passport juga berperan penting dalam mendukung kesinambungan pelayanan kesehatan bagi PMI deportasi. Buku kesehatan ini dibawa oleh PMI mulai dari proses skrining kesehatan di PLBN Entikong, selama berada di shelter deportasi, hingga kembali ke daerah asal. Dengan demikian, setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan dapat melihat riwayat kesehatan PMI secara lengkap dan berkelanjutan. Hal tersebut sangat penting terutama bagi PMI dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus yang membutuhkan pemantauan rutin dan pengobatan jangka panjang. Keberlanjutan pencatatan kesehatan dapat

membantu mencegah terjadinya putus pengobatan maupun keterlambatan penanganan penyakit (Cahyani & Indriani, 2023).

Selain penyakit tidak menular, *Health Book Passport* juga mendukung pemantauan penyakit menular pada PMI deportasi. Penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut, tuberkulosis, penyakit kulit menular, dan diare merupakan masalah kesehatan yang cukup sering ditemukan pada kelompok pekerja migran akibat lingkungan tempat tinggal yang padat dan kurang higienis. Melalui pencatatan kesehatan yang dilakukan secara rutin, tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini terhadap gejala penyakit menular sehingga penanganan dan rujukan dapat dilakukan lebih cepat untuk mencegah risiko penularan yang lebih luas (Safitri & Wibisono, 2022).

Keunggulan lain dari *Health Book Passport* adalah bentuknya yang sederhana, praktis, mudah dibawa, dan tidak bergantung pada jaringan internet maupun perangkat digital. Kondisi wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan sarana teknologi kesehatan menjadi salah satu alasan penting penggunaan media manual dalam pelayanan kesehatan PMI deportasi. Selain itu, sebagian PMI deportasi juga memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital sehingga buku kesehatan manual dinilai lebih mudah dipahami dan digunakan oleh PMI maupun tenaga kesehatan (Saleh et al., 2023).

Penerapan *Health Book Passport* juga memberikan manfaat dalam meningkatkan komunikasi antara PMI dan tenaga kesehatan. Seluruh hasil pemeriksaan, terapi, maupun edukasi kesehatan dicatat dalam satu buku sehingga PMI dapat lebih memahami kondisi kesehatannya sendiri. Edukasi kesehatan yang terdapat dalam buku juga dapat meningkatkan kesadaran PMI terhadap pentingnya menjaga kesehatan, kepatuhan minum obat, serta pemeriksaan kesehatan rutin setelah kembali ke daerah asal. Hal ini menunjukkan bahwa *Health Book Passport* tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi kesehatan, tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan bagi PMI deportasi (Agustiansyah et al., 2024).

Secara keseluruhan, inovasi *Health Book Passport* merupakan bentuk penguatan pelayanan kesehatan bagi PMI deportasi di wilayah perbatasan. Inovasi ini mampu mendukung pencatatan kesehatan yang lebih terstruktur, meningkatkan kesinambungan pelayanan kesehatan, mendukung deteksi dini penyakit, serta membantu tenaga kesehatan dalam melakukan monitoring kesehatan PMI secara berkelanjutan. Dengan penerapan yang sederhana dan biaya yang relatif rendah, *Health Book Passport* berpotensi menjadi inovasi pelayanan kesehatan yang aplikatif dan mudah diterapkan pada pelayanan kesehatan PMI deportasi di wilayah perbatasan Indonesia.

4. Kesimpulan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong merupakan kelompok rentan yang memiliki berbagai permasalahan kesehatan, baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular. Kondisi kerja yang berat, lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, serta proses deportasi yang panjang menyebabkan banyak PMI mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikologis. Selain itu, sebagian besar PMI deportasi tidak memiliki dokumen kesehatan maupun riwayat pengobatan yang lengkap sehingga pelayanan kesehatan sering kali tidak berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Inovasi *Health Book Passport* menjadi salah satu solusi sederhana dan aplikatif dalam mendukung pelayanan kesehatan PMI deportasi di wilayah perbatasan. *Health Book Passport* merupakan buku kesehatan manual berbentuk seperti paspor yang digunakan sebagai media pencatatan identitas kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan, riwayat penyakit menular dan penyakit tidak menular, riwayat pengobatan, edukasi kesehatan, serta rujukan pelayanan kesehatan. Buku kesehatan ini dibawa oleh PMI sejak proses skrining kesehatan di PLBN Entikong, selama berada di shelter deportasi, hingga kembali ke daerah asal sehingga riwayat kesehatan PMI dapat dipantau secara berkelanjutan. Penerapan *Health Book Passport* memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan maupun PMI deportasi. Bagi tenaga kesehatan, buku ini membantu proses dokumentasi kesehatan menjadi lebih sistematis, mempermudah pemantauan kondisi kesehatan PMI, serta mempercepat proses pemeriksaan dan rujukan pelayanan kesehatan. Sementara bagi PMI, *Health Book Passport* membantu meningkatkan pemahaman terhadap kondisi kesehatan yang dimiliki, mendukung kepatuhan pengobatan, serta menjadi media edukasi kesehatan yang dapat digunakan secara mandiri. Selain itu, *Health Book Passport* juga berperan dalam mendukung deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular pada PMI deportasi. Melalui pencatatan kesehatan yang dilakukan secara rutin, tenaga kesehatan dapat lebih mudah mengidentifikasi kondisi kesehatan PMI yang membutuhkan tindak lanjut maupun pengobatan jangka panjang. Inovasi ini juga membantu mengurangi risiko putus pengobatan pada PMI dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus serta mendukung pengawasan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan penularan di lingkungan sekitar. Keunggulan utama dari inovasi ini adalah bentuknya yang sederhana, praktis, mudah dibawa, biaya rendah, dan

tidak bergantung pada jaringan internet maupun perangkat digital. Hal tersebut menjadikan Health Book Passport sangat sesuai diterapkan pada pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan seperti PLBN Entikong yang memiliki keterbatasan sarana teknologi dan tingginya mobilitas PMI deportasi. Dengan demikian, inovasi Health Book Passport dapat menjadi salah satu bentuk penguatan sistem pelayanan kesehatan bagi PMI deportasi di wilayah perbatasan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesinambungan pelayanan kesehatan, memperbaiki sistem dokumentasi kesehatan PMI, mendukung deteksi dini penyakit, serta meningkatkan perlindungan kesehatan PMI deportasi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan dukungan dan kerja sama antara tenaga kesehatan, pengelola PLBN, Kementerian P2MI/BP2MI, serta fasilitas pelayanan kesehatan di daerah asal agar penerapan Health Book Passport dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi PMI deportasi..

Referensi

1. Agustiansyah, T. A., Hastuti, L., Lestari, L., & Haryanto. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Pekerja Migran: Scoping Review. *Jurnal RIGGS*.
2. Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2022). *Profil Pos Lintas Batas Negara Entikong*. Jakarta: BNPP.
4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2023*. Jakarta: BP2MI.
5. Cahyani, F. D., & Indriani, D. (2023). Perspektif Global terhadap Dampak Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
6. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. (2022). *Pedoman Pengendalian Penyakit Menular di Wilayah Perbatasan*. Jakarta: Kemenkes RI.
7. International Labour Organization. (2021). *Health Protection for Migrant Workers*. Geneva: ILO.
8. International Organization for Migration. (2021). *Migration Health Annual Review 2021*. Geneva: IOM.
9. Juliansyah, R., dkk. (2024). Implementation of EMR System in Indonesian Health Facilities: Benefits and Constraints. *Journal of Digital Health*.
10. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Migran di Wilayah Perbatasan*. Jakarta: Kemenkes RI.
11. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Direktorat P2PTM Kemenkes RI.
12. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
13. Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
14. Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing*. 11th Edition. St. Louis: Elsevier.
15. Safitri, D., & Wibisono, A. (2022). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Jurnal Intermestic*.
16. Saleh, R., Adnan, R. S., & Raharto, A. (2023). Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
17. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
18. United Nations International Labour Organization. (2022). *Labour Migration and Health: Policy Brief*. Geneva: ILO.
19. World Health Organization. (2022). *World Health Statistics 2022: Monitoring Health for the SDGs*. Geneva: WHO.
20. World Health Organization. (2023). *Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2023*. Geneva: WHO.